

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAMIKA IMIGRAN AS-MEKSIKO

2.1. Gambaran Geografis Perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko

Secara geografis, Meksiko merupakan negara yang terletak di kawasan Amerika Utara dan berbatasan langsung dengan AS di bagian utara. Berdasarkan data dari US Geological Survey (USGS), panjang garis perbatasan kedua negara mencapai kurang lebih 1.933 mil. Wilayah perbatasan ini membentang dari Samudra Pasifik di sebelah barat hingga Teluk Meksiko di sebelah timur, melewati berbagai lanskap seperti padang pasir, pegunungan, sungai, hingga kawasan pemukiman.

Di sepanjang garis perbatasan AS-Meksiko, terdapat sejumlah negara bagian yang secara langsung berbatasan satu sama lain. Di sisi AS, perbatasan melintasi empat negara bagian, yaitu California, Arizona, New Mexico, dan Texas. Sementara itu, di sisi Meksiko terdapat enam negara bagian yang berbatasan langsung dengan Amerika Serikat, yakni Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, dan Tamaulipas (The New York Times, 2017). Setiap negara bagian ini memiliki karakter geografis, demografis, dan sosial yang berbeda, sehingga membentuk dinamika yang beragam dalam aktivitas ekonomi, hubungan masyarakat lintas batas, hingga pengelolaan infrastruktur perbatasan.



Gambar 2.1 Negara di sekitar perbatasan AS-Meksiko

Sumber: US Geological Survey

Perbatasan darat antara AS dan Meksiko merupakan salah satu garis batas terpanjang di dunia dengan panjang sekitar 3.145 kilometer, membentang dari California hingga Texas (Melendez & Pellegrini, 2022). Wilayah perbatasan ini memiliki kondisi geografis yang beragam, mulai dari kawasan gurun dan pegunungan hingga wilayah sungai, dengan Sungai Rio Grande sebagai elemen utama yang memisahkan Texas dari beberapa negara bagian Meksiko. Kawasan di sepanjang sungai dan gurun ini juga menyimpan sumber daya seperti air, mineral, dan lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian serta pemukiman, sehingga menambah kompleksitas karakter wilayah perbatasan ini.

Selain batas darat, AS dan Meksiko juga memiliki batas maritim di dua wilayah utama, yakni Samudra Pasifik dan Teluk Meksiko. Di Samudra Pasifik, batas ini berada di lepas pantai antara San Diego dan Tijuana, yang merupakan jalur laut penting bagi perdagangan dan logistik regional. Sementara itu, di Teluk Meksiko, batas maritim membentang di perairan dekat pesisir Texas hingga pantai

timur Meksiko, kawasan strategis yang berperan dalam pelayaran industri serta eksplorasi energi seperti minyak dan gas lepas pantai.

Wilayah perbatasan AS-Meksiko ditandai oleh keberadaan kota-kota kembar (*twin cities*) seperti San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, dan Laredo-Nuevo Laredo yang menjadi pusat aktivitas lintas batas. Kota-kota ini berfungsi sebagai simpul perdagangan, mobilitas penduduk, dan interaksi sosial harian, sehingga menjadikan kawasan perbatasan sebagai wilayah urban yang dinamis dan saling terhubung, bukan sekadar garis pemisah geografis dalam hubungan AS-Meksiko (Gutiérrez et al., 2021).

2.1.1. Kondisi Perbatasan AS-Meksiko

Akan tetapi, di balik intensitas aktivitas ekonomi, sosial, dan mobilitas antar kawasan yang berlangsung secara legal setiap hari, perbatasan ini juga menyimpan tantangan yang bersifat lebih kompleks. Karakter geografis wilayah perbatasan turut mempengaruhi pola dan rute perlintasan imigran ilegal dari Meksiko atau Amerika Tengah menuju AS, karena variasi kondisi alam dan strategi pengawasan membuat beberapa titik tertentu menjadi lebih rawan dan kerap dimanfaatkan sebagai jalur masuk secara ilegal. Dalam hal ini, dinamika geografis kawasan tidak hanya menentukan peluang mobilitas resmi, tetapi juga menciptakan ruang-ruang yang rentan terhadap aktivitas lintas batas yang tidak terawasi secara optimal (Collins & Kohout, 2020).

Wilayah tertentu di sepanjang perbatasan bahkan telah dikenal sebagai jalur perlintasan utama bagi imigran ilegal seperti kawasan Gurun Sonora

di negara bagian Arizona, yang memiliki kondisi lingkungan ekstrim dengan suhu sangat tinggi pada siang hari dan rendah pada malam hari (Pianalto & Yool, 2021). Meskipun berbahaya, wilayah gurun ini kerap dipilih karena relatif jauh dari pemukiman dan pos patroli utama, sehingga lebih sulit dipantau oleh aparat keamanan.

Di wilayah Texas, Sungai Rio Grande juga menjadi salah satu rute perlintasan yang paling sering digunakan oleh migran karena aliran sungai yang panjang dengan variasi kedalaman membuat banyak titik sulit diawasi sehingga mendorong sebagian migran untuk menyeberang menggunakan perahu kecil atau berenang (Palacio et al., 2021). Selain itu, terdapat pula kawasan berbatu dan pegunungan di sepanjang perbatasan, terutama di bagian New Mexico dan Arizona, yang menyulitkan akses kendaraan patroli dan memberikan celah bagi penyelundup maupun migran untuk bergerak relatif tersembunyi. Kondisi alam yang beragam ini pada akhirnya menjadikan sebagian wilayah perbatasan sebagai rute migrasi berisiko tinggi namun tetap dipilih karena minim pengawasan dan celah yang sulit dijangkau aparat keamanan.

2.2. Dinamika Imigrasi dan Keamanan Perbatasan AS-Meksiko dari Tahun ke Tahun

2.2.1. Dinamika Imigrasi AS-Meksiko

Dinamika migrasi antara AS dan Meksiko telah berlangsung selama lebih dari satu abad dan terus mengalami perubahan yang signifikan seiring perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di kawasan Amerika Utara.

Migrasi warga Meksiko ke AS pada awalnya didominasi oleh laki-laki yang pergi sebagai pekerja, sementara perempuan biasanya menyusul setelah para suami atau ayah mulai tinggal lebih lama di wilayah AS (Massey et al., 2014). Pola ini terlihat jelas terutama sebelum tahun 1940, ketika migrasi perempuan hampir tidak terjadi karena perpindahan tenaga kerja masih bersifat musiman dan berfokus pada pekerja laki-laki di sektor pertanian atau industri.

Situasi tersebut semakin menguat pada masa Program Bracero (1942-1964), yaitu program perekrutan tenaga kerja sementara yang secara khusus menerima pekerja laki-laki, sehingga peluang perempuan untuk ikut bermigrasi tetap sangat rendah. Namun setelah program tersebut berakhir, mobilitas keluarga mulai meningkat pada 1970-an dan 1980-an, di mana migrasi menjadi lebih bersifat menetap dan tidak lagi hanya didorong oleh kebutuhan tenaga kerja musiman. Pada periode tersebut, semakin banyak keluarga yang melakukan reunifikasi sehingga aliran migrasi perempuan meningkat secara bertahap (Durand & Massey, 2019).

Pada akhir 1980-an, pola migrasi yang digambarkan dalam *Return to Aztlan* sebenarnya menunjukkan kondisi “*undocumented era*”, yaitu masa ketika pergerakan pekerja Meksiko ke AS terjadi cukup bebas dan penegakan hukum di perbatasan masih longgar. Pekerja dapat keluar masuk perbatasan secara musiman karena kebutuhan tenaga kerja murah di sektor pertanian, konstruksi, dan jasa. Pada masa ini, kontrol perbatasan belum terlalu intensif dan mobilitas migran lebih dipengaruhi oleh jaringan sosial, seperti keluarga

atau komunitas yang sudah terlebih dahulu tinggal di AS (Massey & Riosmena, 2010).

Situasi tersebut membuat banyak warga Meksiko melihat AS sebagai tujuan yang mudah dijangkau untuk mencari pekerjaan, terutama karena upah di AS jauh lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri. Tekanan ekonomi di Meksiko seperti minimnya lapangan kerja, ketimpangan pendapatan, dan ketidakstabilan ekonomi turut mendorong semakin banyak orang untuk bermigrasi demi mengatasi kesulitan hidup (Selee et al., 2019). Arus migrasi menjadi semakin kuat karena banyak komunitas migran sudah lebih dulu menetap di AS, sehingga jaringan sosial ini mempermudah pendatang baru dalam mencari informasi, pekerjaan, dan tempat tinggal.

Pada masa tersebut, migrasi tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh pola perpindahan yang masih bersifat musiman dan cukup longgar. Banyak pekerja Meksiko bolak-balik ke AS tanpa niat untuk menetap karena mereka masih bisa melintasi perbatasan dengan relatif mudah. Kemudahan mobilitas ini justru memperbesar arus migrasi, sebab para pekerja yang sudah terbiasa melakukan perjalanan berulang kemudian mendorong keluarga, kerabat, atau teman sekampung untuk mengikuti jejak mereka. Alhasil, jaringan sosial yang kuat serta peluang kerja yang selalu tersedia di sektor pertanian, konstruksi, dan jasa membuat migrasi tumbuh secara alami dan terus berlanjut dari waktu ke waktu.

Namun, memasuki memasuki era kebijakan ekonomi baru di Meksiko dan perubahan regulasi imigrasi di AS, dinamika migrasi tersebut perlahan

berubah. Ketika ekonomi Meksiko mulai beralih ke pasar terbuka, banyak sektor domestik tidak mampu bersaing sehingga menciptakan lonjakan pengangguran di beberapa wilayah (Durand & Massey, 2019). Kebijakan ekonomi neoliberal mulai diterapkan di Meksiko terutama melalui liberalisasi perdagangan pada akhir 1980-an dan berlanjut dengan berlakunya NAFTA pada 1994 struktur ekonomi di berbagai wilayah mengalami perubahan besar.

Peristiwa tersebut juga menyebabkan pertanian dan usaha kecil tradisional menjadi yang paling terdampak, karena produksi lokal tidak mampu bersaing dengan masuknya barang-barang impor murah dari AS. Akibat dari tekanan ekonomi tersebut, tingkat pengangguran dan *underemployment* meningkat, terutama di kawasan pedesaan atau wilayah yang sebelumnya menggantungkan hidup pada pertanian dan sektor informal (Durand & Massey, 2019).

Meski liberalisasi ekonomi dan masuknya investasi asing sempat membuka peluang baru, terutama melalui sektor manufaktur dan ekspor seperti keberadaan pabrik-pabrik maquiladora di kawasan perbatasan, kenyataannya tidak semua pekerja dapat merasakan manfaat tersebut. Banyak pekerjaan yang tercipta bersifat rentan, upah yang diberikan relatif rendah, jam kerja panjang, dan kondisi kerja sering kali tidak memenuhi standar keselamatan. Selain itu, tingkat keamanan kerja juga lemah karena perusahaan cenderung merekrut tenaga kerja kontrak yang mudah diganti kapan saja. Situasi ini membuat sebagian besar pekerja merasa bahwa peluang ekonomi yang ditawarkan tidak dapat menjamin kehidupan jangka panjang yang stabil (Nápoles, 2017).

Kondisi ekonomi yang rapuh di banyak wilayah inilah yang mendorong banyak orang Meksiko untuk bermigrasi ke AS demi mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih stabil. Ketika kesempatan kerja di dalam negeri semakin terbatas, migrasi dipandang sebagai jalan yang paling realistis untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Aliran remitansi tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari ekonomi lokal di berbagai daerah Meksiko, sehingga semakin memperkuat pola migrasi lintas perbatasan.

Di sisi lain, permintaan tenaga kerja di AS turut memperkuat arus migrasi ini. Permintaan tenaga kerja di AS, terutama di sektor pertanian, konstruksi, manufaktur, dan jasa, telah menjadi salah satu pendorong utama arus migrasi dari Meksiko ke AS. Banyak perusahaan dan petani di AS membutuhkan pekerja yang bersedia bekerja dalam kondisi berat, jam kerja panjang, serta upah rendah. Karena sebagian besar warga lokal enggan mengambil pekerjaan semacam ini, para pekerja migran termasuk yang berasal dari Meksiko, dianggap mampu mengisi kekosongan tenaga kerja tersebut (Pew Research Centre, 2005).

Sebagian besar imigran Meksiko yang bekerja di AS akhirnya masuk sektor-sektor seperti yaitu pertanian, konstruksi, manufaktur, dan layanan seperti perhotelan atau restoran. Pola ini terus bertahan karena sektor-sektor tersebut memang selalu membutuhkan banyak pekerja. Namun, mulai tahun 2004 ada perubahan kecil, dimana migran yang baru datang lebih banyak bekerja di bidang konstruksi dan perhotelan. Salah satu alasannya adalah karena para migran kini tersebar ke kota-kota baru seperti Atlanta, Raleigh, dan New York. Di kota-kota tersebut, peluang kerja di konstruksi dan perhotelan

jauh lebih banyak dibandingkan wilayah tujuan lama seperti Los Angeles, sehingga migran mengikuti daerah yang menyediakan lapangan pekerjaan terbesar bagi mereka (Pew Research Centre, 2005).

2.2.2. Keamanan Perbatasan AS-Meksiko pada Abad ke-21

Pada awal abad ke-21, terutama setelah serangan 11 September 2001 kebijakan keamanan perbatasan AS dengan Meksiko berubah semakin ketat. Pemerintah AS mulai melihat ancaman keamanan bukan hanya dari imigran ilegal, tetapi juga kemungkinan masuknya teroris, perdagangan narkoba, dan kejahatan lintas negara lainnya. Hal tersebut menjadikan perbatasan tidak lagi hanya dijaga untuk mengontrol imigrasi, tetapi juga dijadikan salah satu garda depan pertahanan nasional. Pada masa ini, pemerintah AS meningkatkan jumlah penjaga perbatasan, memperluas penggunaan teknologi seperti kamera pengawas, sensor gerak, satelit, dan drone untuk memantau pergerakan di sepanjang perbatasan (US Department Homeland Security, n.d.).

Selain itu, setelah peristiwa 9/11 pemerintah AS mulai menerapkan berbagai undang-undang baru terkait keamanan, termasuk pembentukan Departemen Keamanan Dalam Negeri atau US Department Homeland Security (DHS). Lembaga ini dibentuk pada tahun 2002 sebagai respons langsung terhadap kekhawatiran bahwa ancaman luar negeri dapat masuk ke wilayah AS melalui celah keamanan dalam negeri, termasuk perbatasan. DHS bertugas menyatukan berbagai badan yang sebelumnya bekerja sendiri-sendiri seperti Bea Cukai, Penjaga Perbatasan, dan Imigrasi agar koordinasi dan penegakan keamanan lebih efektif.

Memasuki tahun 2009, ketika Barack Obama resmi menjabat sebagai Presiden AS, situasi keamanan perbatasan AS-Meksiko telah berada dalam kondisi ketat sebagai warisan dari pengetatan besar-besaran setelah serangan 11 September 2001. Kebijakan keamanan pada masa Obama berupaya menyeimbangkan antara perlindungan keamanan nasional dan kebutuhan reformasi imigrasi yang lebih manusiawi. Pemerintah Obama mewarisi infrastruktur perbatasan yang semakin luas seperti pagar baja, peningkatan kamera pengawasan, patroli bersenjata, serta berkembangnya teknologi keamanan seperti drone dan perangkat sensor. Namun, Obama juga menegaskan bahwa kebijakan perbatasan harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih terukur dan berbasis risiko, bukan sekadar memperluas penindakan fisik di lapangan (Argueta, 2016).

Dalam praktiknya, kebijakan keamanan perbatasan pada era Obama lebih diarahkan untuk memfokuskan penegakan hukum pada kelompok yang dianggap paling berbahaya, bukan menindak semua imigran tanpa dokumen secara merata. Pemerintahan Obama memperkenalkan kebijakan penegakan berbasis prioritas, di mana aparat perbatasan diminta memusatkan sumber daya pada pelaku penyelundupan, pengedar narkoba, terduga teroris, serta imigran ilegal yang memiliki catatan kriminal (The White House, 2014).

2.2.2.1. Isu Imigran Ilegal dan Keamanan Perbatasan AS-Meksiko pada Era Donald Trump 1.0

Memasuki tahun 2017, ketika pemerintahan Donald Trump resmi dimulai, terjadi pergeseran drastis dalam pendekatan AS terhadap

isu imigrasi dan keamanan perbatasan. Sejak periode kampanye, Donald Trump telah mengeluarkan slogan “*Make America Great Again*” sebagai wujud keyakinannya terhadap kebangkitan ekonomi AS, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan luar negeri yang diusung pada saat itu lebih condong ke memproteksi diri. Jika pada era Obama keamanan perbatasan masih dipadukan dengan pendekatan kemanusiaan tertentu, Trump justru mendorong narasi yang jauh lebih keras (Sahide, 2021).

Pemerintahan Trump menganggap keamanan perbatasan sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional, sehingga isu ini dijadikan salah satu prioritas paling utama sejak hari pertama menjabat. Retorika politik Trump menekankan bahwa arus imigran ilegal dan aktivitas kartel narkoba berasal dari wilayah Meksiko, sehingga diperlukan tindakan tegas untuk memperkuat perlindungan perbatasan selatan. Narasi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakannya melalui penerbitan *Executive Order 13768* yang menetapkan rezim penegakan imigrasi domestik yang jauh lebih ketat (Hogan, 2024).

Salah satu langkah untuk meningkatkan keamanan perbatasan pada masa pemerintahan Trump adalah usulannya untuk membangun “Trump Wall”, yaitu proyek pembangunan tembok perbatasan yang lebih panjang, lebih tinggi, dan lebih kokoh dibandingkan pagar yang telah ada sebelumnya. Trump mempromosikan tembok ini sebagai solusi utama untuk menghentikan imigran ilegal, mencegah penyelundupan narkoba, dan memutus jalur masuk kelompok kriminal. Ide ini kemudian menjadi simbol politik kampanye dan pemerintahan Trump yang menunjukkan

tekad untuk mengambil langkah keras dalam menjaga kedaulatan wilayah AS. Proyek ini juga diperkenalkan sebagai cara untuk mengembalikan kontrol penuh atas perbatasan selatan yang menurut Trump telah lama dianggap lemah (Trump White House, 2020).



Gambar 2.2 *Trump Wall*

Sumber: The New York Times

Dalam implementasinya, pembangunan Trump Wall tidak sepenuhnya berjalan seperti yang dibayangkan. Alih-alih membangun tembok baru sepanjang ribuan kilometer, sebagian besar konstruksi yang terealisasi merupakan penggantian atau penguatan pagar lama dengan desain yang lebih modern dan tahan lama. Pemerintahan Trump juga menghadapi hambatan anggaran yang cukup besar karena Kongres tidak menyetujui seluruh dana yang diminta. Hal ini berujung pada salah satu *government shutdown* terpanjang dalam sejarah AS, ketika Trump tetap bersikeras bahwa pembangunan tembok adalah kebutuhan mendesak bagi keamanan nasional. Untuk mengatasi kekurangan dana, Trump akhirnya

menyatakan keadaan darurat nasional agar dapat mengalihkan dana dari anggaran militer untuk proyek tersebut (Brunnstrom & Morgan, 2019).

Pada Desember 2018, pemerintahan Trump 1.0 membuat kebijakan yang disebut Migrant Protection Protocols (MPP) atau yang disebut dengan 'Remain in Mexico' (American Immigration Council, 2024). MPP merupakan kebijakan yang mewajibkan imigran yang masuk atau mencoba masuk ke Amerika Serikat tanpa dokumen yang sah melalui perbatasan selatan untuk dikembalikan sementara ke wilayah Meksiko sambil menunggu proses imigrasi mereka di pengadilan AS. Dengan demikian, ketika imigran ilegal tiba di perbatasan dan ditangkap oleh otoritas AS, mereka tidak diproses di dalam wilayah AS, melainkan harus menunggu keputusan hukum dari wilayah Meksiko. Dalam praktiknya, kebijakan ini dinilai bermasalah karena banyak imigran harus tinggal di wilayah perbatasan Meksiko yang tidak aman dengan akses terbatas terhadap perlindungan hukum, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak (American Immigration Council, 2024).

Dalam rangka membatasi semakin tingginya tingkat imigran ilegal yang masuk, pemerintahan Trump pada waktu itu mengeluarkan kebijakan *zero tolerance*, yaitu kebijakan penegakan hukum imigrasi yang mewajibkan seluruh pelanggaran masuk secara ilegal diproses secara pidana tanpa pengecualian (Refugees International, 2018). Kebijakan ini diumumkan pada April 2018 dan diterapkan terhadap setiap individu yang memasuki wilayah AS di luar jalur-jalur masuk resmi, termasuk para imigran dan pencari suaka. Melalui kebijakan ini,

pemerintah AS menekankan pendekatan penegakan hukum yang ketat dengan mengkriminalisasi pelanggaran imigrasi, sehingga migrasi ilegal diposisikan sebagai pelanggaran hukum yang harus ditangani melalui mekanisme pidana.

Penerapan kebijakan *zero tolerance* tersebut kemudian berdampak pada munculnya kebijakan *family separation*, yaitu pemisahan antara anak-anak dan orang tua atau pendamping mereka yang memasuki wilayah AS secara ilegal. Dalam praktiknya, ketika orang dewasa masuk melalui jalur tidak sah, mereka akan ditahan oleh ICE dan akan dikirim ke *Department of Justice* untuk diproses melalui jalur pidana atas pelanggaran imigrasi. Sementara itu, anak-anak yang menyertai mereka tidak dapat ditahan bersama dan ditempatkan secara terpisah oleh otoritas imigrasi dan ditempatkan di *Office of Refugee Resettlement* (Frye, 2020).

2.2.2.2. Isu Imigran Ilegal dan Keamanan Perbatasan AS-Meksiko pada Era Joe Biden

Pada tahun 2019, anggota kongres AS, Alexandria Ocasio-Cortez (dikenal dengan AOC) secara terbuka menyebut bahwa kebijakan atas imigran ilegal yang diterapkan oleh Trump 1.0 sebagai “*anti-American*”. Menurutnya, para imigran justru mencerminkan nilai-nilai dasar AS, seperti upaya untuk mencari kesempatan dan bekerja keras. Ia juga menilai bahwa perlakuan terhadap imigran, termasuk kebijakan pemisahan keluarga dalam *zero tolerance policy*, merupakan

bentuk pelanggaran hak asasi manusia (Miller, 2019). Kritik terhadap pendekatan represif dalam kebijakan imigrasi kemudian berlanjut dalam bentuk dorongan perubahan kebijakan pada era pemerintahan Biden. Dalam hal ini, AOC pada tahun 2021 secara aktif mendorong penerapan kebijakan yang lebih humanis melalui surat yang ditujukan kepada pemerintah, bersama 34 anggota Kongres, dengan menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap imigran dan hak suaka (Ocasio-Cortez, 2021).

Kritik terhadap kebijakan imigran ilegal era Trump 1.0 juga disampaikan oleh organisasi domestik seperti American Civil Liberties Union (ACLU). Organisasi ini menilai bahwa kebijakan MPP merupakan kebijakan yang melanggar hukum serta “*unspeakably cruel*”. ACLU juga menyoroti bahwa para imigran yang terdampak kebijakan tersebut kerap menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi di wilayah perbatasan, termasuk penculikan, pemerkosaan, dan serangan kekerasan lainnya (ACLU, 2021).

Lebih lanjut, ACLU mendesak pemerintahan Biden untuk mengambil langkah yang lebih tegas dengan membangun kebijakan imigrasi yang lebih manusiawi, antara lain dengan mencabut kebijakan MPP secara permanen serta menangani dampak buruk yang ditimbulkannya. Selain itu, ACLU juga menekankan pentingnya upaya pemulihan bagi para imigran yang terdampak kebijakan *zero tolerance* dan praktik *family separation*, serta mendorong agar pemerintahan Biden supaya tidak melanjutkan pendekatan represif era Trump 1.0, melainkan

memastikan perlakuan yang aman dan berlandaskan prinsip kemanusiaan terhadap para imigran (ACLU, 2021).

Kritik terhadap kebijakan Trump 1.0 juga disuarakan oleh media arus utama seperti The Washington Post. Dalam salah satu artikelnya yang berjudul “*Biden is right to end Trump inhumane border policies*”, kebijakan atas imigran pada era Trump 1.0 tersebut secara keseluruhan digambarkan sebagai “*inhumane border policies*” yang dirancang untuk membatasi akses para imigran dan pencari suaka melalui pendekatan yang keras. Artikel tersebut menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya mengabaikan kewajiban hukum AS terhadap imigran dan pencari suaka, tetapi juga menempatkan para imigran dalam kondisi yang berbahaya. Lebih lanjut, artikel The Washington Post tersebut secara eksplisit menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintahan Joe Biden dalam mengakhiri kebijakan Trump 1.0, dengan menekankan pentingnya pergeseran menuju pendekatan yang lebih humanis dalam menangani isu imigrasi (The Washington Post, 2021).

Menjelang dimulainya pemerintahan Biden pada Januari 2021, Human Rights Watch (HRW) mendorong tim transisi presiden terpilih untuk segera melakukan pembaruan menyeluruh terhadap sistem imigrasi AS serta menghentikan kebijakan-kebijakan represif yang diterapkan pada era Trump 1.0. HRW menilai bahwa pendekatan keamanan pada era sebelumnya telah memicu pelanggaran hak asasi manusia, khususnya di perbatasan selatan AS. HRW juga merekomendasikan agar pemerintahan Biden membangun sistem

imigrasi yang *'fair and humane'* dengan memprioritaskan perlindungan martabat dan keselamatan migran, serta bertindak cepat untuk memastikan perlakuan yang manusiawi terhadap seluruh migran di perbatasan (Human Rights Watch, 2021).

Pada saat Biden menjabat sebagai presiden AS ke-46, pendekatan keamanan perbatasan mengalami pergeseran yang cukup signifikan dibandingkan era sebelumnya. Biden mencoba menata ulang sistem perbatasan dengan menyeimbangkan aspek keamanan dan kemanusiaan. Hal ini terlihat pernyataannya yang menegaskan bahwa *"immigration has always been a lifeblood of America... So I will never demonize immigrants."* (Figueroa et al., 2024). Sejalan dengan pernyataan tersebut, sejak awal masa jabatannya Biden berkomitmen tidak hanya untuk membatalkan kebijakan imigrasi sebelumnya yang ia anggap terlalu keras, tetapi juga untuk membuka peluang baru bagi jutaan imigran ilegal yang telah lama tinggal di AS agar dapat memperoleh status hukum secara sah (Chishti et al., 2024).

Komitmen tersebut kemudian diwujudkan melalui penerbitan *Executive Order 13993*, yang secara resmi mencabut *Executive Order 13768* milik pemerintahan Trump. Melalui kebijakan ini, Biden menghentikan pendekatan penegakan imigrasi yang bersifat represif dan mengarahkan kembali kebijakan imigrasi pada penegakan hukum yang lebih terukur dan tidak lagi memprioritaskan *mass deportation* terhadap imigran ilegal (The American Presidency Project, 2021).

Pada era Biden, kebijakan deportasi terhadap imigran ilegal tetap dijalankan, namun tidak lagi ditempatkan dalam kerangka *mass deportation* sebagaimana pada masa pemerintahan sebelumnya. Deportasi tetap dilakukan, tetapi melalui mekanisme hukum yang diatur dalam Title 8 US Code, yang menekankan prosedur hukum dan prinsip *due process*. Hal tersebut ditegaskan oleh Pelaksana Tugas Komisaris U.S CBP pada 2023 yang menyatakan bahwa “*we will continue to fully enforce our immigration laws in a safe, orderly, and humane manner. Individuals without a legal basis to remain in the United States will be subject to prompt expulsion under Title 8*” (Homeland Security, 2023).

Komitmen Biden juga terlihat jelas dalam pernyataan resmi selama masa kampanye kepresidenannya. Melalui laman kampanye, Biden menegaskan niatnya untuk membangun “*a fair and humane immigration system*” serta memulihkan kebijakan yang menurutnya telah “*cruelly undone*” oleh pemerintahan Trump. Ia juga menyatakan bahwa pemerintahannya akan “*secure our border, while ensuring the dignity of migrants and upholding their legal right to seek asylum*”, serta menegakkan hukum imigrasi “*without targeting communities, violating due process, or tearing apart families*” (Varela, 2022).

Hal tersebut terlihat dalam sejumlah kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Biden, seperti penghentian pembangunan tembok perbatasan yang digagas pada era Trump, pengakhiran kebijakan *Migrant Protection Protocols* (MPP), serta pengenalan langkah-langkah yang lebih ramah terhadap imigran. Salah satu implementasi dari pendekatan

ini adalah penerapan aplikasi (*Customs and Border Protection*) CBP One, yang dirancang sebagai mekanisme pendaftaran dan penjadwalan bagi para imigran agar dapat mengakses titik perbatasan resmi (*port of entry*) secara lebih tertib dan teratur (American Immigration Council, 2025).

Melalui aplikasi CBP One, para imigran dapat melakukan pendaftaran dan menjadwalkan kedatangan mereka di titik resmi sebelum memasuki wilayah AS. Mekanisme ini memungkinkan otoritas perbatasan untuk mengatur kedatangan imigran secara lebih terorganisir sekaligus mengurangi praktik penyeberangan ilegal atau *crossing illegal* di antara titik perbatasan. Pada waktu yang telah dijadwalkan, para imigran kemudian datang ke titik perbatasan tersebut untuk menjalani pemeriksaan awal dan proses administrasi oleh petugas U.S. CBP sesuai dengan prosedur imigrasi yang berlaku (U.S. CBP, 2023)

Langkah Biden dalam menata ulang kebijakan keamanan perbatasan juga terlihat dari keputusannya untuk menghentikan pembangunan tembok perbatasan yang sebelumnya menjadi simbol utama pendekatan keamanan era Trump. Biden menghentikan pendanaan dan konstruksi tembok tersebut dengan alasan bahwa pembangunan fisik tidak secara efektif menyelesaikan persoalan migrasi ilegal. Komitmen ini kemudian diwujudkan melalui penerbitan *Proclamation 10142*, yang secara resmi menghentikan seluruh pembangunan tembok perbatasan, mencabut status keadaan darurat nasional yang sebelumnya dideklarasikan oleh Trump, serta mengalihkan kembali dana yang

sempat dialokasikan untuk proyek tembok perbatasan tersebut (Hogan, 2024).

Pada Januari 2021, pemerintahan Biden juga mengambil langkah untuk mencabut secara praktik *zero tolerance* dan *family separation* yang diterapkan oleh Trump (Motion Law, 2021). Sebagai tindak lanjut, Biden membentuk *Interagency Task Force on the Reunification of Families* yang bertugas untuk melacak dan menyatukan kembali anak-anak yang sebelumnya dipisahkan dari keluarganya. Pada Februari 2023, telah berhasil dipertemukan kembali lebih dari 600 anak dengan keluarga mereka yang terpisah akibat kebijakan *zero-tolerance* pada pemerintahan Trump (Homeland Security, 2023).

2.2.2.3. Isu Imigran Ilegal dan Keamanan Perbatasan AS-Meksiko pada Era Donald Trump 2.0

Kembalinya Donald Trump sebagai presiden AS berimplikasi pada terjadinya perubahan dalam penanganan imigran ilegal, khususnya yang berasal dari Meksiko. Kebijakan penanganan imigran ilegal dan keamanan perbatasan di era Trump 2.0 kembali diarahkan pada pendekatan yang menempatkan imigran ilegal sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan kedaulatan negara. Trump mengeluarkan kebijakan '*securing our borders and interest*' untuk masuknya warga negara asing dari sejumlah negara dipandang perlu untuk melindungi keamanan nasional dan keselamatan publik AS.

Pada awal kepemimpinannya, Trump menyatakan “*I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came*”, yang menegaskan adanya penekanan pada kondisi darurat di perbatasan serta upaya pengetatan terhadap imigran ilegal (The White House, 2025).

Dalam pidatonya di depan PBB Trump mengatakan “*if you come illegally into the United States, you’re going to jail or you’re going back to where you came from*”, pernyataan tersebut menandakan adanya penegasan kembali bahwa imigran ilegal merupakan pelanggaran yang mengancam ketertiban dan keamanan negara (Share America, 2025). Pernyataan ini juga diperkuat melalui unggahannya di platform Truth Social, di mana ia menulis, “*our country has been invaded by illegal aliens, many of whom are murderers and criminal of the highest order*” (Cebi, 2025). Selain itu, Trump juga kerap menggunakan istilah seperti ‘*aliens*’, ‘*animals*’, dan ‘*people with bad genes*’, untuk merujuk pada imigran ilegal dalam berbagai pernyataannya (Niezen, 2025).

Trump memandang bahwa masuknya pendatang dari sejumlah negara tertentu membawa potensi ancaman terhadap keamanan nasional karena keterbatasan informasi yang tersedia mengenai identitas dan latar belakang mereka. Ketidakmampuan negara asal dalam menyediakan data kependudukan, catatan kriminal, maupun dokumen perjalanan yang dapat diverifikasi secara akurat dinilai melemahkan proses penyaringan

(*vetting*) imigran. Dalam kerangka ini, keterbatasan informasi tersebut dikonstruksikan sebagai risiko yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kriminal, ekstremis, maupun individu yang berpotensi membahayakan kepentingan nasional AS (The White House, 2025).

Dalam berbagai pernyataannya, Trump juga menyampaikan sejumlah pernyataan yang menegaskan pandangannya terhadap imigran ilegal. Ia menyebut imigran ilegal sebagai “*top threat to public safety*” yang dikaitkan dengan isu kejahatan dan keamanan domestik, serta menyebut mereka sebagai “*public safety threats*” yang harus “*off our streets*” setiap hari (The White House, 2025). Trump juga menyebut bahwa imigran ilegal “*poisoning the blood of our country*”, dan mempertahankan penggunaan istilah tersebut dengan menyatakan negara sedang “diracuni”. Dalam hal ini, Trump mengaitkan imigran, khususnya dari Meksiko, dengan pelaku kejahatan berat dan narapidana (Slattery et al., 2025).

Selain itu, Trump juga memandang imigran ilegal sebagai ancaman langsung terhadap keamanan dan ekonomi AS. Dalam pidatonya, ia mengaitkan imigran ilegal dari Meksiko dengan kejahatan dan peredaran obat-obatan terlarang dengan menyatakan bahwa “[*Mexican illegal immigrants*] are bringing drugs, they’re bringing crime, they’re rapists...”, yang memperkuat *framing* bahwa imigran ilegal diposisikan sebagai sumber risiko keamanan publik. Di sisi ekonomi, Trump juga menilai bahwa imigran ilegal merugikan tenaga kerja domestik karena bersedia menerima upah rendah, sehingga

mengambil alih lapangan pekerjaan warga AS dengan mengatakan *“they’re taking your jobs, every job produced in this country over the last two years has gone to illegal aliens”* (Zars, 2025).

Penegasan yang serupa juga terlihat dalam pernyataan Trump bahwa *“for the last four years, the United States was ruled by politicians who fought only by insiders, illegal aliens, career criminal, and above all foreign nations which took advantage of us at levels never seen before. They flooded your cities and towns with illegal aliens. They decimated your hard-earned savings”* (Wolf, 2025). Pernyataan tersebut menggambarkan imigran ilegal sebagai faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan sosial dan ekonomi di dalam negeri, khususnya dalam kaitannya dengan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pada periode kepemimpinan Trump 2.0, kebijakan pada imigran ilegal kembali diarahkan pada pengetatan penegakan hukum melalui wacana dan rencana penerapan *mass deportation* terhadap imigran ilegal. Pendekatan ini terlihat pada retorika Trump yang menggambarkan komitmen untuk mendeportasi dalam skala besar terhadap imigran ilegal, *“mass deportations now! We’re going to have the largest deportation, we have no choice”* (Figuera, 2024). Trump juga membingkai bahwa *mass deportation* adalah kebijakan yang memberikan manfaat domestik khususnya bagi warga AS karena tindakan tersebut berkontribusi pada penurunan harga perumahan, peningkatan upah pekerja domestik, bertambahnya lapangan kerja bagi warga asli, serta penurunan tingkat kriminalitas (The White House, 2026).

Selain itu, pemerintah AS juga meningkatkan penegakan hukum melalui razia di lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja. Praktik ini membuat banyak imigran hidup dalam kondisi tidak aman karena sewaktu-waktu dapat diperiksa atau ditangkap oleh aparat imigrasi. Kebijakan ini tidak hanya menasar pendatang baru, tetapi juga imigran lain yang tidak memiliki status hukum yang jelas. Mereka yang sebelumnya pernah menerima perintah deportasi atau pernah berhadapan dengan sistem hukum pidana menjadi kelompok yang paling berisiko terdampak oleh kebijakan tersebut (National Immigrant Justice Center, n.d.).

Tidak hanya kebijakan pengetatan penegakan hukum terhadap imigran ilegal, pemerintahan Trump juga kembali menjadikan pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko atau Trump Wall sebagai bagian utama dari strategi keamanan perbatasan. Pemerintah federal mulai melanjutkan pembangunan tembok di wilayah selatan Texas, termasuk di sekitar Alamo, dengan mengalokasikan dana sekitar 70 juta dolar AS untuk membangun sekitar tujuh mil tembok baru di area yang sebelumnya sempat dihentikan pada masa pemerintahan Biden. Pembangunan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan pada masa jabatan pertama Trump, di mana sekitar 450 mil penghalang perbatasan telah dibangun di sepanjang perbatasan AS-Meksiko, dengan konsentrasi terbesar berada di Texas Selatan (Sanchez, 2025).

Pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko tersebut, secara teknis juga dirancang bukan semata-mata untuk sepenuhnya

menghentikan masuknya imigran ilegal, melainkan untuk mengarahkan pergerakan mereka ke titik-titik tertentu agar lebih mudah diawasi dan diamankan oleh aparat penegak hukum perbatasan. Badan Patroli Perbatasan AS menyatakan bahwa keberadaan tembok berfungsi sebagai alat pengendalian ruang yang mempermudah proses penangkapan dan pengawasan (Sanchez, 2025).

Pada Januari 2025, Trump menyatakan bahwa *“our southern border is overrun by cartels, criminal gangs, known terrorists, human traffickers, smugglers, unvetted military-age males from foreign adversaries, and illicit narcotics that harm Americans... [it] represent a grave threat to our Nation.”* Ia juga menggambarkan arus imigran ilegal sebagai sebuah *“invasion”* yang memerlukan respons tegas, termasuk pengerahan pasukan dan perluasan tembok perbatasan (D’Arrigo, 2025).

Melalui sebuah perintah eksekutif, pemerintahan Trump 2.0 juga menghentikan pemrosesan masuk seluruh imigran ilegal ke AS, serta menginstruksikan petugas patroli perbatasan untuk langsung menolak mereka tanpa memberikan kesempatan sidang (Yousif, 2025). Kebijakan ini turut disertai dengan penghentian penggunaan aplikasi CBP One, yang sebelumnya digunakan pada era pemerintahan Biden sebagai instrumen administratif untuk mengatur kedatangan imigran secara legal melalui sistem janji temu, sekaligus sebagai mekanisme untuk membatasi masuknya imigran secara tidak teratur tanpa sepenuhnya menutup akses terhadap para imigran. (The Guardian, 2025).

Di sisi lain, pemerintahan Trump juga mengaktifkan kembali kebijakan Migrant Protection Protocols (MPP) atau yang dikenal sebagai *Remain in Mexico*, yaitu kebijakan yang mewajibkan bagi para pencari suaka maupun imigran yang tiba di *Port of Entry* (POE) di perbatasan selatan AS agar dikembalikan ke Mexico untuk menunggu durasi proses imigrasi mereka. Department of Homeland Security menekankan bahwa kebijakan ini diterapkan kembali setelah sebelumnya dihentikan oleh Presiden Joe Biden pada tahun 2021. Kebijakan ini pertama kali diperkenalkan oleh Trump pada 2019 dan menjadi bagian dari agenda keamanan perbatasan yang menekankan pembatasan ketat terhadap masuknya migran.

Trump berargumen bahwa *Remain in Mexico* diperlukan untuk mencegah klaim imigran yang dianggap tidak sah dan untuk mengurangi beban sistem imigrasi AS. Namun, kebijakan ini menuai kritik luas dari kelompok advokasi imigran dan organisasi kemanusiaan. Mereka menilai bahwa kebijakan tersebut justru menempatkan migran, termasuk keluarga dengan anak-anak, dalam kondisi yang berbahaya karena harus tinggal di wilayah perbatasan Meksiko yang memiliki tingkat kejahatan tinggi, akses layanan kesehatan terbatas, serta kondisi tempat tinggal yang tidak layak (The Guardian, 2025).

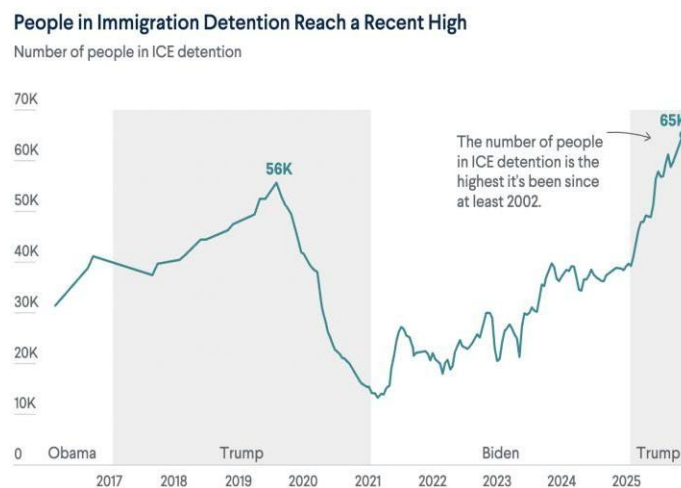
Selain memperketat kebijakan di perbatasan, pemerintahan Trump juga memperluas kewenangan Immigration and Customs Enforcement (ICE) dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap imigran tidak berdokumen di dalam wilayah Amerika Serikat.

ICE merupakan lembaga federal AS yang bertugas menegakkan hukum imigrasi, termasuk mengidentifikasi, menahan, dan mendeportasi individu yang tidak memiliki status hukum yang sah (US ICE, 2025). Pada era pemerintahan Trump, peran ICE semakin diperkuat sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan *mass deportation*, yang menjadi salah satu janji utama kampanye Trump, serta dalam patroli dan penegakan hukum imigrasi di perbatasan (BBC, 2026).

Sejak Trump kembali menjabat, pemerintahan AS memperluas operasi ICE di dalam negeri dengan mengubah prioritas penegakan hukum, menambah sumber daya, serta melibatkan lembaga federal lain dalam penegakan kebijakan imigrasi (Haddock & Roy, 2025). Melalui sejumlah perintah eksekutif, Trump juga membatalkan pedoman lama yang sebelumnya melarang razia imigrasi di area yang dianggap sensitif, seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah (Yousif, 2025). Trump menilai bahwa kebijakan imigrasi pada era Biden gagal menangani lonjakan migran di perbatasan sehingga banyak imigran ilegal dilepaskan ke dalam wilayah AS, kondisi ini menurutnya perlu dikoreksi melalui penegakan hukum imigrasi yang lebih agresif. Pada Mei 2025, Penasihat Keamanan Dalam Negeri AS, Stephen Miller, mengonfirmasi bahwa pemerintah menetapkan target penangkapan harian sebanyak 3.000 imigran tidak berdokumen. *“Under President Trump’s leadership, we are looking to set a goal of a minimum of 3,000 arrests for ICE every day and President Trump is going to keep pushing to get that number up higher each and every day”*, pernyataan tersebut

diungkapkan oleh penasihat senior The White House (Cheney, 2025).

Kebijakan penangkapan 3.000 imigran ilegal tersebut bertujuan untuk mempercepat dan memperluas penegakan hukum imigrasi demi mencapai agenda deportasi massal yang menjadi janji utama pemerintahan Trump dan meningkatkan jumlah penahanan imigran tanpa dokumen di dalam negeri (Singh, 2025). Imigran yang telah ditangkap akan ditempatkan di *immigration detention centers* yang dikelola oleh ICE, tempat mereka menunggu proses hukum imigrasi atau keputusan pemulangan/deportasi (Olivares, 2025).



Gambar 2.3 Jumlah imigran yang ditangkap oleh ICE
Sumber: Transnational Record Access Clearinghouse, Syracuse University

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada pertengahan November 2025, lebih dari 65.000 orang berada dalam tahanan ICE. Angka tersebut merupakan jumlah tertinggi imigran yang ditahan oleh ICE sejak 2002 (Haddock & Roy, 2025). Lonjakan jumlah penahanan ini menunjukkan semakin agresifnya penegakan hukum imigrasi, khususnya setelah pemerintah menetapkan target penangkapan harian yang tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat perubahan kebijakan yang signifikan dalam penanganan imigran ilegal di AS. Perubahan ini terlihat dari pergeseran pendekatan pada era Trump 1.0 yang menekankan penegakan hukum secara represif melalui kebijakan seperti *zero tolerance*, *family separation*, dan MPP, menuju pendekatan yang lebih humanis pada era Biden yang menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia, penghentian kebijakan represif, serta penggunaan mekanisme administratif dalam pengelolaan imigran. Namun, pada era Trump 2.0, terjadi pergeseran kembali menuju pendekatan keamanan yang lebih ketat, ditandai dengan wacana mass deportation, penguatan peran aparat penegak hukum, serta konstruksi imigran ilegal sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Dengan demikian, perubahan kebijakan imigrasi di AS tidak bersifat linear, melainkan menunjukkan dinamika pergeseran antara pendekatan kemanusiaan dan keamanan.

2.3. Isu Keamanan dan Persepsi Publik terhadap Imigran Ilegal Meksiko

2.3.1. Persepsi Publik AS terhadap Imigran Ilegal

Isu imigran ilegal asal Meksiko sejak lama menjadi salah satu topik paling sensitif dalam politik domestik AS. Sensitivitas ini muncul karena perbatasan AS-Meksiko merupakan jalur migrasi terbesar di dunia dan menjadi titik mobilitas manusia yang sangat tinggi dari tahun ke tahun. Ketika jumlah kedatangan meningkat, perhatian publik dan politisi biasanya ikut menguat, sehingga isu ini hampir selalu menjadi bahan perdebatan politik yang hangat.

Pada tahun 2021, Pew Research Center merilis temuan mengenai pandangan masyarakat AS terhadap berbagai persoalan nasional yang tengah dihadapi negara tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa isu yang dianggap penting oleh publik sangat beragam, mulai dari kejahatan kekerasan, rasisme, *climate change*, hingga masuknya imigran ilegal. Dalam permasalahan imigran ilegal, sebanyak 48% warga AS menganggapnya sebagai masalah yang sangat besar, sementara 29% lainnya menilainya sebagai *a moderately big problem*. Di sisi lain, hanya 19% responden yang menganggap isu ini sebagai masalah kecil, dan 4% menyatakan bahwa imigran ilegal bukan merupakan masalah sama sekali (Pew Research Centre, 2021).

Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh *The New York Times* pada periode 22-27 September 2025, tercatat bahwa 54% warga AS menyatakan dukungan terhadap kebijakan deportasi imigran ilegal untuk dikembalikan ke negara asalnya. Di sisi lain, hasil survei tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan masyarakat. Sebanyak 18% responden menyatakan *somewhat oppose*, sementara 24% lainnya secara tegas menolak (*strongly oppose*) kebijakan tersebut. Selain itu, kurang dari 1% responden menyatakan tidak mengetahui isu tersebut, dan 2% memilih untuk tidak menjawab atau menolak memberikan pendapat (The New York Times, 2025).

Sementara itu Pew Research Center melakukan survei terkait *Americans concerns* tentang imigran ilegal dari Meksiko dan menunjukkan bahwa kekhawatiran publik AS terhadap imigran ilegal dari Meksiko

muncul dalam berbagai bentuk. Sebanyak 22% responden menyatakan kekhawatiran terhadap beban ekonomi (*net economic burden*), yang meliputi tekanan terhadap sumber daya publik, beban ekonomi secara umum, serta anggapan bahwa imigran ilegal mengambil lapangan pekerjaan warga Amerika. Selain itu, 22% responden menyoroti isu keamanan (*net security concerns*), seperti meningkatnya tingkat kriminalitas, masuknya individu berbahaya akibat proses penyaringan yang lemah, serta peredaran narkoba. (Pew Research Centre, 2024).

Di luar itu, 15% responden mengungkapkan kekhawatiran terkait permasalahan perumahan, sistem imigrasi yang dinilai tidak berjalan dengan baik, serta dugaan penyalahgunaan sistem oleh migran. Sementara itu, 10% responden menyoroti faktor lain seperti jumlah migran yang dinilai terlalu besar serta dampak kehadiran migran terhadap komunitas lokal. (Pew Research Centre, 2024).

Warga AS juga menunjukkan kekhawatiran yang kuat terhadap imigran ilegal dan mendukung tindakan penegakan hukum yang ketat. “*Coming here illegally, that’s a crime in and of itself. They didn’t follow due process coming in. They don’t need due process going out*”, ucapan warga AS tersebut menunjukkan pandangan bahwa imigran yang masuk secara ilegal dianggap melanggar hukum sejak awal dan karenanya tidak berhak atas perlindungan atau proses hukum yang sama seperti imigran legal (Licon & Devaux, 2025).

2.3.2. Maraknya Kartel Narkoba Meksiko dan Ancaman Kejahatan Lintas Batas

Kekhawatiran publik terhadap migrasi dari Meksiko semakin meningkat ketika isu tersebut dikaitkan dengan aktivitas kartel narkoba yang telah lama menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan kawasan. Beberapa kelompok kriminal terorganisir di Meksiko telah memanfaatkan jalur perbatasan termasuk rute yang biasa dilalui migran untuk menyelundupkan manusia dan obat-obatan terlarang ke AS. Pemanfaatan jalur tersebut tidak hanya terjadi lewat rute resmi, tetapi juga melalui rute ilegal yang sulit diawasi, seperti jalur gurun, lautan, atau jalan tanah terpencil. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa arus imigran ilegal tidak sekadar membawa tenaga kerja, tetapi juga potensi risiko keamanan bagi masyarakat AS (US ICE, 2025).

Banyak kartel besar seperti *Cártel de Jalisco Nueva Generación* (CJNG), diketahui memanfaatkan wilayah perbatasan sebagai jalur utama untuk menyelundupkan narkoba maupun manusia ke AS (US Drug Enforcement Administration, n.d.). Dalam beberapa kasus, jaringan kartel bekerja sama dengan kelompok penyelundup manusia untuk mengatur pergerakan individu yang melintasi perbatasan secara ilegal, sehingga membuat jalur migrasi semakin rentan terhadap kelompok kriminal. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa peningkatan arus migrasi membuka peluang bagi kartel untuk memperluas operasi, baik melalui narkoba maupun eksploitasi migran yang harus membayar biaya perjalanan tinggi.

Berdasarkan data dari U.S. Customs and Border Protection,

ditunjukkan bahwa aparat berhasil menyita hampir 549.000 pon (± 249 ton) narkoba di seluruh AS pada tahun fiskal 2023, yang sebagian besar berasal dari jalur perbatasan AS-Meksiko (US CBP, 2025). Dari lebih dari jutaan migran yang dihentikan oleh Border Patrol antara tahun fiskal 2022–2024, terdapat 249 orang yang ditemukan membawa narkoba saat dihadapkan dengan patroli (Mendoza, 2025).

Di sisi lain, laporan penegak hukum AS menunjukkan bahwa sebagian besar obat-obatan yang masuk ke AS diproduksi oleh kartel di Meksiko sebelum diselundupkan melalui berbagai rute yang sulit dideteksi, termasuk kendaraan dengan kompartemen tersembunyi, kargo legal, hingga jalur laut (Drug Enforcement Administration, 2021). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa kartel Meksiko tidak hanya mengandalkan satu metode, melainkan memadukan berbagai teknik penyelundupan untuk meminimalkan risiko tertangkap, sehingga menambah kekhawatiran publik terhadap potensi ancaman keamanan dari arus migrasi yang melintasi perbatasan.

2.4. Posisi Amerika Serikat terhadap Norma Global Migrasi

2.4.1. 1967 Protocols & Non-Refoulement

Protocol Relating to the Status of Refugees 1967 memperluas dan menyempurnakan Konvensi Pengungsi 1951 yang semula membatasi perlindungan pengungsi pada peristiwa sebelum 1951 dan situasi di Eropa pasca-Perang Dunia II (UNCHR, n.d.). Dengan menghapus pembatasan temporal dan geografis tersebut, Protokol 1967 memungkinkan prinsip-prinsip

perlindungan pengungsi diterapkan secara universal tanpa menggantikan Konvensi 1951, melainkan memperluas jangkauan penerapannya agar sesuai dengan dinamika migrasi global.

Meskipun tidak menjadi pihak dalam Konvensi 1951, AS telah meratifikasi Protokol 1967 pada 1 November 1968 (FORUM, 2019). Ratifikasi ini menunjukkan bahwa AS menerima substansi utama dari rezim perlindungan pengungsi internasional, khususnya prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Konvensi 1951 sebagaimana diperluas oleh Protokol 1967. Dengan meratifikasi Protokol tersebut, AS menyatakan komitmennya terhadap norma global perlindungan pengungsi tanpa terikat pada batasan geografis dan temporal yang sebelumnya melekat pada Konvensi 1951.

Salah satu prinsip utama dalam Konvensi 1951 yang ditegaskan kembali oleh Protokol 1967 adalah *non-refoulement*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33. Prinsip ini melarang negara mengusir, mengembalikan, atau memaksa seseorang kembali ke wilayah di mana nyawa atau kebebasannya terancam. *Non-refoulement* menjadi pilar utama dalam rezim perlindungan pengungsi internasional karena menetapkan batas minimum yang wajib dipatuhi negara dalam kebijakan migrasi dan suaka. Dengan meratifikasi Protokol 1967, AS secara normatif mengakui prinsip ini sebagai bagian dari kewajibannya dalam hukum internasional dan menegaskan komitmennya terhadap perlindungan pengungsi (Lauterpacht & Bethlehem, 2003).

Selain sebagai prinsip utama dalam hukum pengungsi, *non-refoulement* juga dipahami sebagai bagian dari hukum HAM internasional yang berlaku secara lebih luas. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh

dikembalikan ke wilayah di mana ia berisiko mengalami penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, tanpa memandang status keimigrasiannya. Sebagaimana ditegaskan bahwa “*Under international human rights law, the principle of non-refoulement guarantees that no one should be returned to a country where they would face torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and other irreparable harm. This principle applies to all migrants at all times, irrespective of migration status*” (UN Network on Migration, 2018). Dengan demikian, *non-refoulement* tidak hanya berlaku bagi pengungsi, tetapi juga terhadap individu lain, termasuk imigran, yang menghadapi risiko serius apabila dipulangkan.

Komitmen AS terhadap Protokol Pengungsi 1967 tidak hanya berlaku di tingkat internasional, tetapi juga diinternalisasi ke dalam kerangka hukum domestik melalui Immigration and Nationality Act (INA), yang pertama kali disahkan pada 1952 sebagai dasar utama pengaturan imigrasi. Ketentuan mengenai perlindungan pengungsi dalam INA baru secara signifikan diselaraskan dengan rezim internasional setelah ratifikasi Protokol 1967, terutama melalui Refugee Act of 1980, yang mengamandemen INA dengan mengadopsi definisi pengungsi dan standar perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 (American Immigration Council, 2025).

Dalam praktiknya, ketentuan INA tersebut dikodifikasikan ke dalam Title 8 United States Code. US Code merupakan kodifikasi resmi hukum federal AS yang mengelompokkan berbagai undang-undang berdasarkan bidang pengaturannya, dan Title 8 pada US Code dijadikan rujukan utama

dalam pelaksanaan penegakan hukum imigrasi di AS. Dalam kerangka ini, deportasi tidak dilakukan secara otomatis, melainkan melalui prosedur hukum yang mencakup pemeriksaan imigrasi, kesempatan menghadiri *removal proceedings* di hadapan hakim imigrasi, serta akses terhadap mekanisme perlindungan seperti pengajuan suaka sebagaimana diatur dalam 8 U.S.C. §1158. Dengan demikian, pelaksanaan deportasi berdasarkan Title 8 tetap berada dalam kerangka *due process of law*.

2.4.2. UDHR Pasal 9

Selain instrumen yang bersifat mengikat secara hukum, pembahasan mengenai norma global migrasi juga tidak dapat dilepaskan dari Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Salah satu ketentuan penting dalam konteks migrasi dan adalah Pasal 9 UDHR, yang menyatakan bahwa “*no one shall be subjected to arbitrary test, detention or exile*” (United Nations, n.d.). Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang, tetap dilindungi dari penangkapan, penahanan, dan pengusiran yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Namun demikian, perlu ditekankan bahwa UDHR bukan merupakan perjanjian internasional yang bersifat mengikat secara hukum (*non-legally binding*) (UNESCO, 2020). Berbeda dengan konvensi internasional, UDHR tidak memerlukan proses ratifikasi oleh negara-negara anggota PBB, sehingga tidak menimbulkan kewajiban hukum formal sebagaimana traktat internasional. Oleh karena itu, AS tidak memiliki kewajiban hukum yang mengikat untuk mematuhi Pasal 9 UDHR. Dalam hukum internasional, UDHR

dikategorikan sebagai *soft law*, yaitu instrumen normatif yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, tetapi memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk standar, nilai, dan ekspektasi perilaku negara dalam komunitas internasional (Madalina & Natasya, 2024).

Meskipun tidak mengikat secara hukum, UDHR memiliki posisi yang sangat penting sebagai fondasi norma hak asasi manusia global. Banyak prinsip dalam UDHR kemudian diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai perjanjian internasional yang bersifat mengikat, termasuk Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Dengan demikian, Pasal 9 UDHR berfungsi sebagai rujukan normatif awal yang membentuk pemahaman internasional mengenai hak atas imigran, meskipun tidak menciptakan kewajiban hukum langsung bagi negara-negara termasuk AS.

2.4.3. Pasal 22 ICRMW

Dalam perkembangan norma internasional mengenai perlindungan migran, perhatian komunitas global tidak hanya tertuju pada pengungsi dan pencari suaka, tetapi juga pada perlindungan hak-hak pekerja migran secara lebih luas. Salah satu instrumen yang secara khusus mengatur hal tersebut adalah International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW). Konvensi ini disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1990 sebagai respons terhadap meningkatnya kerentanan pekerja migran, khususnya mereka yang berada dalam situasi tidak berdokumen.

Pasal 22 ICRMW secara khusus mengatur larangan pengusiran kolektif

serta kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap keputusan deportasi terhadap pekerja migran dilakukan melalui prosedur hukum yang adil. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa "*migrant workers and members of their families shall not be subject to measures of collective expulsion. Each case of expulsion shall be examined and decided individually*", serta bahwa individu yang akan dideportasi memiliki hak untuk mengajukan alasan keberatan, meminta peninjauan kembali keputusan tersebut, dan memperoleh kesempatan untuk membela diri melalui mekanisme hukum yang sah (OHCHR, n.d.). Ketentuan ini menunjukkan bahwa proses deportasi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus mempertimbangkan prinsip *due process of law* dan perlindungan HAM.

Meskipun AS tidak meratifikasi ICRMW dan ketentuan di dalamnya tidak mengikat secara hukum, konvensi ini tetap mencerminkan sikap kehati-hatian negara-negara tujuan migrasi utama terhadap instrumen internasional yang memberikan perlindungan luas bagi pekerja migran, khususnya mereka yang berstatus tidak berdokumen. Dalam hal ini, Pasal 22 ICRMW yang mengatur larangan pengusiran kolektif serta perlunya prosedur hukum yang adil dalam proses deportasi tidak dapat dipahami sebagai kewajiban hukum bagi AS, melainkan sebagai tolak ukur normatif dalam menilai sejauh mana kebijakan deportasi dan pembatasan migrasi sejalan dengan prinsip perlindungan HAM yang diakui secara internasional. Oleh karena itu, meskipun tidak bersifat mengikat, keberadaan ICRMW tetap relevan sebagai bagian dari norma global (*soft law*) yang digunakan untuk menilai ketegangan antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan hak-hak migran dalam kebijakan migrasi AS.

2.5. Hubungan Konsep *Norm Diffusion*, Konsep *Regime Complexity*, dan Teori Sekuritisasi Copenhagen School

Hubungan antara *norm diffusion*, *regime complexity*, dan teori sekuritisasi dalam kebijakan imigrasi dan keamanan perbatasan AS-Meksiko menunjukkan adanya tarik ulur kebijakan antara komitmen terhadap norma global dan kepentingan keamanan nasional. Di satu sisi, norma internasional mengenai perlindungan migran mengalami proses difusi melalui berbagai instrumen global, seperti UDHR, Konvensi Pengungsi 1951, dan Protokol 1967. Norma-norma ini mendorong negara untuk mengedepankan prinsip kemanusiaan, perlindungan hak asasi, serta akses terhadap suaka bagi individu yang mengalami penganiayaan. Proses ini terlihat dalam upaya AS mengadopsi sebagian norma tersebut ke dalam hukum domestik, terutama melalui Immigration and Nationality Act.

Namun, proses *norm diffusion* tersebut tidak berjalan secara linier. Dalam praktiknya, terjadi tarik ulur kebijakan yang kuat antara rezim perlindungan migran dan rezim keamanan negara. Kondisi ini menunjukkan adanya *regime complexity*, yakni situasi ketika berbagai rezim internasional yang mengatur isu yang sama seperti rezim perlindungan migran dan rezim keamanan perbatasan saling tumpang tindih dan membawa logika yang berbeda. Ketika rezim perlindungan HAM menekankan kewajiban kemanusiaan, rezim keamanan justru menekankan kontrol, pencegahan, dan stabilitas nasional. Akibatnya, kebijakan migrasi AS tidak bersifat konsisten, melainkan berubah-ubah mengikuti rezim mana yang lebih dominan dalam suatu periode pemerintahan.

Tarik kebijakan tersebut tampak melalui penerapan teori sekuritisasi

Copenhagen School, yang menjelaskan bagaimana suatu isu dibingkai sebagai ancaman melalui *speech act*. Pada era Trump periode pertama, imigran ilegal diposisikan sebagai ancaman keamanan sehingga melahirkan kebijakan yang bersifat restriktif. Ketika pemerintahan Biden berkuasa, terjadi proses desekuritisasi dengan penekanan yang lebih besar pada aspek kemanusiaan. Namun, pada periode Trump berikutnya, isu imigrasi kembali mengalami re- sekuritisasi, di mana migran kembali dibingkai sebagai ancaman yang memerlukan pengetatan kebijakan perbatasan. Dinamika ini menunjukkan adanya tarik ulur antara pendekatan keamanan dan perlindungan migran dalam kebijakan AS.